

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain *menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.*

Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPKP Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan, sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pusat BPKP. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen untuk pengambilan keputusan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jayapura, 29 April 2019

Kepala Perwakilan, 4



Sueb Cahyadi

NIP 19640508 198603 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel dan Grafik	iii
Daftar Lampiran	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis	7
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	9
A.3. Basis Akuntansi	9
A.4. Dasar Pengukuran	9
A.5. Kebijakan Akuntansi	10
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	19
B.2. Belanja Negara	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	25
C.1. Aset Lancar	25
C.2. Aset Tetap	26
C.3. Kewajiban Jangka Pendek	30
C.4. Ekuitas	31
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	32
D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	32
D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	37
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	39
E.1. Ekuitas Awal	39
E.2. Surplus/(Defisit) LO	39
E.3. Transaksi Antar Entitas	39
E.4. Ekuitas Akhir	40
F. Informasi Penting Lainnya	41
F.1. Informasi Dana Penugasan Bantuan Kedinasan	41

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

		Halaman
Tabel 1	: Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN Tahun 2018	19
Tabel 2	: Perbandingan Realisasi PNBPN Tahun 2018 dan 2017	20
Tabel 3	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program Tahun 2018	20
Tabel 4	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Tahun 2018	21
Tabel 5	: Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2018 dan 2017	21
Tabel 6	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018	22
Tabel 7	: Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018 dan TA 2017	22
Tabel 8	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2018	22
Tabel 9	: Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun 2018 dan TA 2017	23
Tabel 10	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2018	23
Tabel 11	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 dan TA 2017	24
Tabel 12	: Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	25
Tabel 13	: Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	25
Tabel 14	: Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	26
Tabel 15	: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018	29
Tabel 16	: Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	30
Tabel 17	: Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	31
Tabel 18	: Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	31
Tabel 19	: Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	32
Tabel 20	: Rincian Beban Operasional Tahun 2018 dan Tahun 2017	33
Tabel 21	: Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	34
Tabel 22	: Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	35
Tabel 23	: Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	35
Tabel 24	: Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	36
Tabel 25	: Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	37
Grafik 1	: Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2018	21

DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Keuangan Pokok
 - A. Laporan Realisasi Anggaran
 - B. Neraca
 - C. Laporan Operasional
 - D. Laporan Perubahan Ekuitas
2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah
3. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah
4. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
5. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja
6. Laporan Barang Pengguna - SIMAK BMN
7. Daftar Persediaan – SIMAK BMN



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tahun 2018 (Audited) yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir, adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jayapura, 29 April 2019

Kepala Perwakilan, ✍



Sueb Cahyadi

NIP 19640508 198603 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tahun 2018 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja sampai dengan Tahun 2018.

Realisasi Pendapatan Negara s.d Tahun 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp45.674.304,00. Dalam TA 2018 Perwakilan BPKP Provinsi Papua tidak membuat estimasi pendapatan.

Realisasi Belanja Negara s.d Tahun 2018 adalah sebesar Rp26.824.339.328,00 atau mencapai 98,90 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp27.122.518.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2018.

Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp60.474.432.575,00 yang terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp359.708.261,00, Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp60.061.308.189,00, dan Aset Lainnya (netto) Rp53.416.125,00

Nilai Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2018 masing-masing Rp20.102.787,00 dan Rp60.454.329.788,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp36.249.128,00 sedangkan jumlah Beban Operasional adalah sebesar Rp27.420.231.000,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional sebesar (Rp27.383.981.872,00).

Kegiatan Non Operasional terjadi surplus sebesar Rp12.889.185,00, sehingga sampai dengan 31 Desember 2018 Kantor Perwakilan BPKP mengalami Defisit-LO sebesar (Rp27.371.092.687,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 adalah sebesar Rp60.684.617.212,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp27.371.092.687,00, kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp27.140.805.263,00 sehingga Ekuitas BPKP pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp60.454.329.788,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2018			TA 2017 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI THD ANGGARAN	
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.1				
■ Penerimaan Negara Bukan Pajak		-	45.674.304	-	44.711.786
Jumlah Pendapatan		-	45.674.304	-	44.711.786
BELANJA	B.2				
Rupiah Murni					
■ Belanja Pegawai	B.2.1	15.690.616.000	15.588.991.800	99,35	14.361.904.825
■ Belanja Barang	B.2.2	11.208.032.000	11.011.610.528	98,25	5.578.242.386
■ Belanja Modal	B.2.3	223.870.000	223.737.000	99,94	726.426.000
Jumlah Belanja		27.122.518.000	26.824.339.328	98,90	20.666.573.211

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

II. NERACA

**PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

(dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
■ Persediaan	C.1.1	359.708.261	177.361.398
JUMLAH ASET LANCAR		359.708.261	177.361.398
ASET TETAP	C.2		
■ Tanah	C.2.1	39.222.187.000	39.222.187.000
■ Peralatan dan Mesin	C.2.2	6.071.356.617	5.535.621.283
■ Gedung dan Bangunan	C.2.3	20.829.686.000	20.829.686.000
■ Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	249.363.000	249.363.000
■ Akumulasi Penyusutan	C.2.5	(6.311.284.428)	(5.234.517.373)
JUMLAH ASET TETAP		60.061.308.189	60.602.339.910
ASET LAINNYA	C.3		
■ Aset Tak Berwujud	C.3.1	61.047.000	-
■ Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2	(7.630.875)	-
JUMLAH ASET LAINNYA		53.416.125	-
JUMLAH ASET		60.474.432.575	60.779.701.308
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
■ Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4.1	20.102.787	95.084.096
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		20.102.787	95.084.096
JUMLAH KEWAJIBAN		20.102.787	95.084.096
EKUITAS			
■ Ekuitas	C.4.1	60.454.329.788	60.684.617.212
JUMLAH EKUITAS		60.454.329.788	60.684.617.212
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		60.474.432.575	60.779.701.308

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

III. LAPORAN OPERASIONAL

**PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

(dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DES 2018	31 DES 2017
KEGIATAN OPERASIONAL	D.1		
PENDAPATAN OPERASIONAL	D.1.1		
■ Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1.1.1	36.249.128	34.705.154
Jumlah Pendapatan Operasional (D.1.1.1)	D.1.1	36.249.128	34.705.154
BEBAN OPERASIONAL	D.1.2		
■ Beban Pegawai	D.1.2.1	15.518.994.800	14.406.039.825
■ Beban Persediaan	D.1.2.2	255.523.192	185.224.824
■ Beban Barang dan Jasa	D.1.2.3	1.717.230.162	1.369.756.128
■ Beban Pemeliharaan	D.1.2.4	713.859.793	607.458.383
■ Beban Perjalanan Dinas	D.1.2.5	8.141.130.218	3.486.661.605
■ Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.1.2.6	1.073.492.835	879.600.426
Jumlah Beban Operasional (D.1.2.1 s.d. D.1.2.6)	D.1.2	27.420.231.000	20.934.741.191
Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Operasional (D.1.1-D.1.2)	D.1	(27.383.981.872)	(20.900.036.037)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.2		
SURPLUS / (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	D.2.1		
■ Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.1.1	17.945.680	11.509.452
■ Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.1.2	5.056.495	2.771.815
Jumlah Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (D.2.1.1- D.2.1.2)	D.2.1	12.889.185	8.737.637
Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (D.2.1+D.2.2)	D.2	12.889.185	8.737.637
SURPLUS / (DEFISIT) - LO (D.1+D.2)		(27.371.092.687)	(20.891.298.400)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
EKUITAS AWAL	E.1	60.684.617.212	32.149.522.439
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	E.2	(27.371.092.687)	(20.891.298.400)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.1	-	28.804.531.748
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	27.140.805.263	20.621.861.425
■ Ditagihkan ke Entitas Lain	E.4.1	26.824.339.328	20.666.537.211
■ Diterima dari Entitas Lain	E.4.2	(45.674.304)	(44.711.786)
■ Transfer Masuk	E.4.3	362.140.239	-
Jumlah Transaksi Antar Entitas		27.140.805.263	20.621.861.425
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS (E.2+E.3+E.4)		(230.287.424)	28.535.094.773
EKUITAS AKHIR (E.1+E.2+E.3+E.4+E.5)	E.5	60.454.329.788	60.684.617.212

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Profil dan Kebijakan Teknis

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pasal 1 ayat 1, 2 dan 3 mengatur bahwa BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP berperan untuk membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih, membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan memberikan masukan/solusi. Penegasan jati diri sebagai pengawas internal pemerintah adalah dalam arti BPKP lebih mengedepankan peran proaktif untuk dapat memberikan nilai tambah kepada *stakeholder* dan *shareholder*. Dalam hal ini, BPKP berperan untuk meningkatkan proses *governance*, manajemen risiko dan penerapan sistem pengendalian guna mencapai tujuan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan BPKP berperan dalam mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara melalui fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas

keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Perwakilan BPKP Provinsi Papua dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2016.

Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

- ✚ Kepala Perwakilan BPKP : Sueb Cahyadi
- ✚ Kepala Bagian Tata Usaha : Hari Santosa
- ✚ Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Instansi Pemerintah Pusat : Tri Winarno
- ✚ Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah I : Agung Zaenal
- ✚ Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah II : Bonifacius Fredy Joko Susilo
- ✚ Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan Negara : Martiknyo
- ✚ Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi : Agus Sunaryo
- ✚ Koordinator Pengawasan Bidang Perencanaan, Pelaporan dan Pembinaan APIP : Nurtjahyo Sigit Waluyo

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan*

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua per 31 Desember 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Perwakilan BPKP Provinsi Papua. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. BASIS AKUNTANSI

Perwakilan BPKP Provinsi Papua menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPKP dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

**Kebijakan
Akuntansi**

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPKP. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPKP adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Negara (RKUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BPKP adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - Pendapatan Sewa Aset Tetap diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakui pada saat ditetapkan surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat

berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur secara handal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Tarif Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai Bagian Lancar Tagihan TGR.
- Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa

koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Pengembalian belanja modal tahun anggaran yang lalu dicatat sebagai koreksi terhadap nilai aset yang bersangkutan pada saat pengembalian tersebut telah disetorkan ke Kas Negara.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

Penyusutan Aset Tetap

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP), dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor

59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintahan, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban

jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima Dimuka, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pagu awal anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tahun 2018 adalah sebesar Rp28.845.135.000,00 dan direvisi menjadi Rp27.122.515.000,00. Rincian pagu per Jenis Belanja adalah sebagai berikut:

Jenis Belanja		Jumlah Anggaran (Rp)	
Kode	Uraian	Awal (Rp)	Revisi (Rp)
51	Belanja Pegawai	17.346.128.000	15.690.616.000
52	Belanja Barang	11.275.137.000	11.208.032.000
53	Belanja Modal	223.870.000	223.870.000
Total Belanja		28.845.135.000	27.122.518.000

Sedangkan apabila dilihat dari program, maka pagu belanja adalah sebagai berikut:

Uraian Program	Jumlah Pagu	
	Awal (Rp)	Revisi (Rp)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP	20.969.919.000	19.247.302.000
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	7.875.216.000	7.875.216.000
Total	28.845.135.000	27.122.518.000

Realisasi
Pendapatan Negara
dan Hibah
Rp45.674.304,00

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah s.d Tahun 2018 adalah sebesar Rp45.674.304,00 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Keseluruhan Pendapatan Negara di Perwakilan BPKP Provinsi Papua merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP Lainnya Tahun 2018 disajikan pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP s.d Tahun 2018

Jenis Pendapatan	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%tase
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	-	36.249.128	-
Pendapatan Lain-lain	-	9.425.176	-
Total	-	45.674.304	-

Apabila dibandingkan dengan TA 2017, terdapat kenaikan realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp962.518,00 atau 2,15 persen. Perbandingan realisasi PNBP TA 2018 dan TA 2017 disajikan pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Perbandingan Realisasi PNBP TA 2018 dan TA 2017

Uraian Jenis PNBP	Realisasi PNBP (Rp)		Naik / (Turun)	
	TA 2018	TA 2017	Jumlah (Rp)	%
Pendapatan Pemanfaatan BMN	36.249.128	34.280,870	1.968.258	5,74
Pendapatan Iuran dan Denda	0	424,284	(424,284)	(100)
Penerimaan Kembali Belanja TAYL	9,425,176	10,006,632	(581,456)	(5,81)
Total	45.674.304	44,711,786	962.518	2,15

Pendapatan Pemanfaatan BMN merupakan pendapatan yang diperoleh atas sewa BMN oleh pihak ketiga.

Realisasi Belanja
Negara
Rp26.824.339.328,00

B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja Perwakilan BPKP Provinsi s.d Tahun 2018 setelah dikurangi pengembalian belanja adalah sebesar Rp26.824.339.328,00 atau 98,90 persen dari anggaran sebesar Rp27.122.518.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja menurut program Tahun 2018 disajikan pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program Tahun 2018

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP	19.247.302.000	19.118.732.555	99,33
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	7.875.216.000	7.705.606.773	97,85
Total	27.122.518.000	26.824.339.328	98,90

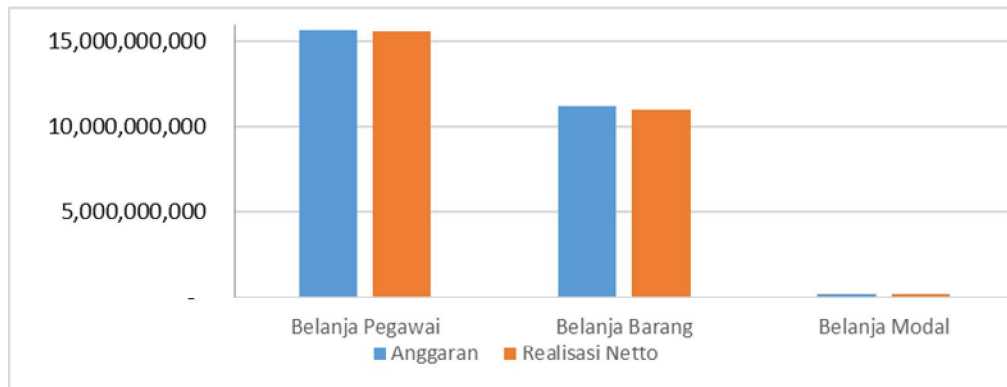
Sedangkan menurut jenis belanja, anggaran dan realisasinya disajikan pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja
Tahun 2018

Uraian	Anggaran	Realisasi Netto
Belanja Pegawai	15.690.616.000	15.588.991.800
Belanja Barang	11.208.032.000	11.011.610.528
Belanja Modal	223.870.000	223.737.000
Total	27.122.518.000	26.824.339.328

Komposisi anggaran dan realisasi belanja Tahun 2018 disajikan pada grafik berikut ini:

Grafik 1
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2018



Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2017, terdapat kenaikan realisasi belanja Tahun 2018 sebesar Rp6.157.766.177,00 atau 29,80%. Perbandingan realisasi belanja Tahun 2018 dan TA 2017 disajikan pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2018 dan TA 2017

Jenis Belanja		Realisasi Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
Kode	Uraian	Tahun 2018	2017	Jumlah (Rp)	%
51	Belanja Pegawai	15.588.991.800	14.361.904.825	1.227.086.825	8,54
52	Belanja Barang	11.011.610.528	5.578.242.386	5.433.368.142	97,40
53	Belanja Modal	223.737.000	726.426.000	(502.689.000)	(69,20)
Total		26.824.339.328	20.666.573.211	6.157.766.117	29,80

Belanja Pegawai
Rp15.588.991.800,00

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp15.588.991.800,00 dan Rp14.361.904.825,00. Rincian

anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018 disajikan pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunj. PNS	7.204.021.000	7.153.293.328	99,30
Belanja Lembur	103.726.00	98.284.000	94,75
Belanja Tunj. Khusus dan Belanja Pegawai Transito	8.382.869.000	8.337.414.472	99,46
Total	15.690.616.000	15.588.991.800	99,35

Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2017, terdapat kenaikan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.227.086.975,00 atau 8,54% karena adanya penambahan jumlah pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Papua. Perbandingan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018 dan TA 2017 disajikan pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018 dan TA 2017

Uraian	Realisasi Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2018	TA 2017	Jumlah (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunj. PNS	7.153.293.328	6.985.405.808	167.887.520	2,40
Belanja Lembur	98.284.000	77.104.000	21.180.000	27,47
Belanja Tunj. Khusus dan Belanja Pegawai Transito	8.337.414.472	7.299.395.017	1.038.019.455	14,22
Total	15.588.991.800	14.361.904.825	1.227.086.975	8,54

Belanja Barang
Rp11.011.610.528,00

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp11.011.610.528,00 dan Rp5.578.242.386,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang TA 2018 disajikan pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2018

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	1.276.051.000	1.266.126.038	99,22
Belanja Barang Non Operasional	134.874.000	127.339.250	94,41

Belanja Barang Persediaan	440.799.000	433.824.061	98,42
Belanja Jasa	342.400.000	328.749.183	96,01
Belanja Pemeliharaan	716.336.000	714.441.778	99,74
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	8.297.572.000	8.141.130.218	98,11
Total	11.208.032.000	11.011.610.528	98,25

Ababila dibandingkan dengan realisasi TA 2017, terdapat kenaikan realisasi Belanja Barang sebesar Rp5.433.368.142,00 atau 97,40 persen karena adanya penambahan anggaran Belanja Perjalanan Dalam Negeri. Perbandingan realisasi Belanja Barang Tahun 2018 dan TA 2017 disajikan pada Tabel 9 berikut ini:

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun 2018 dan TA 2017

Uraian	Realisasi Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2018	Tahun 2017	Jumlah (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	1.266.126.038	1.030.344.827	235.781.211	22,88
Belanja Barang Non Operasional	127.339.250	29.050.000	98.289.250	338,35
Belanja Barang Persediaan	433.824.061	127.852.100	305.971.961	239,32
Belanja Jasa	328.749.183	298.397.421	30.351.762	10,17
Belanja Pemeliharaan	714.441.778	605.936.433	108.505.345	17,91
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	8.141.130.218	3.486.661.605	3.486.661.605	133,49
Total	11.011.610.528	5.578.242.386	5.433.368.142	97,40

Belanja Modal
Rp223.737.000,00

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 dan Tahun 2017 sebesar Rp223.737.000,00 dan Rp726.426.000,00. Realisasi sebesar Rp223.737.000,00 dari anggaran sebesar Rp223.870.000,00 atau 99,94%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun 2018 disajikan pada Tabel 10 berikut ini:

Tabel 10
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2018

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	223.870.000	223.737.000	99,94
Total	223.870.000	223.737.000	99,94

Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2017, terdapat penurunan realisasi Belanja Modal sebesar Rp502.689.000,00 atau 69,20 persen karena adanya penurunan anggaran belanja modal. Perbandingan realisasi Belanja Modal Tahun 2018 dan TA 2017 disajikan pada Tabel 11 berikut ini:

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 dan TA 2017

Uraian	Realisasi Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2018	TA 2017	Jumlah (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	223.737.000	163.150.000	60.587.000	37,14
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	563.276.000	(563.276.000)	(100,00)
Total	223.737.000	726.426.000	(502.689.000)	(69,20)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp359.708.261,00

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp359.708.261,00 dan Rp177.361.398,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan pada Tabel 12 berikut ini:

Tabel 12
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No.	Aset Lancar	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Persediaan	359.708.261	177.361.398
	Jumlah	359.708.261	177.361.398

Persediaan
Rp359.708.261,00

C.1.1. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp359.708.261,00 dan Rp177.361.398,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan pada Tabel 13 berikut ini:

Tabel 13
Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Barang Konsumsi	331.625.408	153.893.716
2	Bahan untuk Pemeliharaan	14.142.436	12.309.000
3	Persediaan Lainnya	13.940.417	11.158.682
	Jumlah	359.708.261	177.361.398

Semua jenis persediaan dengan nilai sebesar Rp359.708.261,00 berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap
Rp60.061.308.189,00

C.2. Aset Tetap

Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp60.061.308.189,00 dan Rp60.602.339.910,00, yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas (12) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan pada Tabel 14 berikut ini:

Tabel 14
Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No.	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Tanah	39.222.187.000	39.222.187.000
2	Peralatan dan Mesin	6.071.356.617	5.535.621.283
3	Gedung dan Bangunan	20.829.686.000	20.829.686.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	249.363.000	249.363.000
Nilai Perolehan		66.372.592.617	65.836.857.283
Akumulasi Penyusutan		(6.311.284.428)	(5.234.517.373)
Nilai Buku		60.061.308.189	60.602.339.910

Tanah
Rp39.222.187.000,00

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Perwakilan BPKP Provinsi Papua per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing seluas 27.722m2 dengan nilai sebesar Rp39.222.187.000,00.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	Rp39.222.187.000,00
Mutasi Tambah:	-
Mutasi Kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2018	Rp39.222.187.000,00
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 31 Desember 2018	Rp39.222.187.000,00

Peralatan dan
Mesin
Rp6.071.356.617,00

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp6.071.356.617,00 dan Rp5.535.621.283,00. Sedangkan nilai buku Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan sebesar Rp867.703.618,00 yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Dalam tahun 2018 terdapat mutasi penambahan transfer masuk peralatan dan mesin sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	5.535.621.283
Mutasi Tambah:	
Pembelian	223.737.000
Transfer Masuk	311.998.334
Jumlah Mutasi Tambah	535.735.334
Mutasi Kurang:	
Jumlah Mutasi Kurang	-
Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	6.071.356.617
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	(5.203.652.999)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	867.703.618

Rincian pembelian Peralatan dan Mesin melalui pembelian dapat dilihat dalam daftar di bawah ini:

No.	Jenis Barang	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Scanner	2	6.800.000	13.600.000
2	Mesin Fax	2	1.450.000	2.900.000
3	LCD/Infocus	1	14.500.000	14.500.000
4	Wifi router	2	1.450.000	2.900.000
5	Mesin Absen	2	4.000.000	8.000.000
6	AC Split	4	5.850.000	23.400.000
7	AC Standing	4	20.750.000	83.000.000
8	Kursi	5	2.196.000	10.980.000
9	Kamera DSLR	1	11.910.000	11.910.000
10	Handycam	1	11.900.000	11.900.000
11	Sound system	2	17.442.500	34.885.000
12	W. Board	1	2.164.000	2.164.000
13	Dispenser	1	1.800.000	1.800.000
14	Voice Recorder	1	1.798.000	1.798.000
Total				223.737.000

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin sebesar Rp311.998.334,00 merupakan transfer masuk dari Pusbin JFA dan Pusinfowas BPKP. Nilai Buku Transfer masuk Rp311.998.334,00 dikurangi dengan penyusutannya Rp2.577.250,00. Rincian transfer masuk Peralatan dan Mesin dapat dilihat dalam daftar di bawah ini:

No.	Jenis Barang	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Printer	1	1.571.000	1.571.000
2	Laptop	1	19.047.000	19.047.000
3	Bracket TV	1	1.909.459	1.909.459
4	End Point Vicon	1	68.349.952	68.349.952
5	TV Samsung	1	13.019.038	13.019.038
6	Laptop Lenovo	14	9.287.130	130.019.820
7	PC Lenovo	3	9.027.130	27.081.390
8	Firewall	1	51.000.675	51.000.675
Total				311.998.334

Saldo Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.071.356.617,00 belum termasuk saldo peralatan dan mesin yang dicatat dalam extracomptable sebesar Rp73.132.668,00.

Gedung dan
Bangunan
Rp20.829.686.000

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017, masing-masing sebesar Rp20.829.686.000,00. Sedangkan nilai buku Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp19.745.891.032,00 yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya.

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	20.829.686.000
Mutasi Tambah:	
Jumlah Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang:	
Jumlah Mutasi Kurang	-
Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	20.829.686.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	(1.083.794.968)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	19.745.891.032

Saldo Gedung dan Bangunan sebesar Rp19.745.891.032,00 belum termasuk saldo gedung dan bangunan yang dicatat dalam extracomptable sebesar Rp5.000.000,00

Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp249.363.000,00

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp249.363.000,00. Sedangkan nilai buku Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp225.526.539,00 yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	249.363.000
Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang	-
Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	249.363.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	(23.836.461)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	225.526.539

**Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp6.311.284.428,00**

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp6.311.284.428,00 dan Rp5.234.517.373,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tanah	39.222.187.000	-	39.222.187.000
2	Peralatan dan Mesin	6.071.356.617	5.203.652.999	867.703.618
3	Gedung dan Bangunan	20.829.686.000	1.083.794.968	19.745.891.032
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	249.363.000	23.836.461	225.526.539
	Jumlah	66.372.592.617	6.311.284.428	60.061.308.189

Perbandingan Mutasi Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No	Uraian	Saldo per 31/12/2018 (Rp)	Saldo per 31/12/2017 (Rp)	Mutasi (Rp)	Beban Penyusutan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	5.203.652.999	4.861.292.097	342.360.902	331.455.807	10.905.095
2	Gedung dan Bangunan	1.083.794.968	361.264.989	722.529.979	722.529.979	
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	23.836.461	11.960.287	11.876.174	11.876.174	
	Total	6.311.284.428	5.234.517.373	1.076.767.055	1.065.861.960	10.905.095

Selisih mutasi pada Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin disebabkan karena adanya Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin yang berasal dari Transfer masuk sebesar Rp10.905.095,00.

Aset Lainnya
Rp53.416.125,00

C.3. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp53.416.125,00 dan Rp0,00.

Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan pada Tabel 15 berikut ini:

Tabel 16
Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No.	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	61.047.000	-
	Nilai Perolehan	61.047.000	-
	Akumulasi Penyusutan	(7.630.875)	-
	Nilai Buku	53.416.125	-

Aset Tak Berwujud
Rp61.047.000,00

C.3.1 Aset Tak Berwujud

Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp53.416.125,00 dan Rp0,00. Nilai sebesar Rp53.416.125,00 merupakan transfer masuk berupa Software Ms. Office Standart 2016 yang diperoleh dari Pusinfowas BPKP dengan Nilai Perolehan sebesar Rp61.047.000,00 dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp7.630.875,00.

Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
Rp7.630.875,00

C.3.2 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp7.630.875,00 dan Rp0,00 merupakan akumulasi penyusutan aset tak berwujud (software).

Kewajiban Jangka
Pendek
Rp20.102.787,00

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp20.102.787,00 dan Rp95.084.096,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan yang seluruhnya merupakan Utang Kepada Pihak Ketiga. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan pada Tabel 16 berikut ini:

Tabel 17
Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No.	Uraian	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	20.102.787	95.084.096
	Jumlah	20.102.787	95.084.096

*Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp20.102.787,00*

C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp20.102.787,00 dan Rp95.084.096,00. Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga terdiri dari:

Tabel 18
**Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017**

No.	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Beban Listrik	20.102.787	25.087.096
2	Beban Uang Makan Pegawai	-	69.997.000
	Jumlah	20.102.787	95.084.096

*Ekuitas
Rp60.454.329.788,00*

C.5. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp60.454.329.788,00 dan Rp60.684.617.212,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset Rp60.474.432.575,00 dan Kewajiban Rp20.102.787,00. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional (Rp27.383.981.872,00)

D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar minus Rp27.383.981.872,00 dan Rp20.900.036.037,00. Defisit sebesar Rp27.383.981.872,00 merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp36.249.128,00 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar Rp27.420.231.000,00.

Pendapatan Operasional Rp36.249.128,00

D.1.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp36.249.128,00 dan Rp34.705.154,00. Jumlah tersebut seluruhnya merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Rp36.249.128,00

D.1.1.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp36.249.128,00 dan Rp34.705.154,00. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO disajikan pada Tabel 19 berikut ini:

Tabel 19
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO
31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi		Naik / (Turun)	
	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Jumlah	%
Pendapatan Pemanfaatan BMN	36.249.128	34.705.154	(1.543.974)	4,45
Jumlah	36.249.128	34.705.154	(4.543.974)	4,45

Realisasi Pendapatan Pemanfaatan BMN pada 31 Desember 2018 menurut Laporan Realisasi Anggaran dan menurut Laporan Operasional adalah sebesar Rp36.249.128,00. Pendapatan Pengelolaan BMN merupakan pendapatan yang diperoleh atas pemanfaatan atau sewa BMN oleh pihak ketiga.

**Tabel Perbandingan Realisasi Pendapatan Operasional per
31 Desember 2018 menurut LO dan LRA:**

Uraian	Realisasi		Selisih
	LO	LRA	
Pendapatan Pemanfaatan BMN	36.249.128	36.249.128	-
Jumlah	36.249.128	36.249.128	-

*Beban Operasional
Rp27.420.231.000,00*

D.1.2. Beban Operasional

Jumlah Beban Operasional pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp27.420.231.000,00 dan Rp20.934.741.191,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional selama Tahun 2018.

Rincian Beban Operasional disajikan pada Tabel 20 berikut ini:

**Tabel 20
Rincian Beban Operasional Tahun 2018 dan Tahun 2017**

Uraian	Realisasi		Naik / (Turun)	
	Tahun 2018	Tahun 2017	Jumlah	%
Beban Pegawai	15.518.994.800	14.406.039.825	1.112.954.975	7,73
Beban Persediaan	255.523.192	185.224.824	70.298.368	37,95
Beban Barang dan Jasa	1.717.230.162	1.369.756.128	347.474.034	25,37
Beban Pemeliharaan	713.859.793	607.458.383	106.401.410	17,52
Beban Perjalanan Dinas	8.141.130.218	3.486.661.605	4.654.468.613	133,49
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.073.492.835	879.600.426	193.892.409	22,04
Jumlah	27.420.231.000	20.934.741.191	6.485.489.809	30,98

*Beban Pegawai
Rp15.518.994.800,00*

D.1.2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp15.518.994.800,00 dan Rp14.406.039.825,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai

imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan pada Tabel 21 berikut:

Tabel 21
Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi		Naik / (Turun)	
	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Jumlah	%
Belanja Gaji Tunjangan PNS	7.083.296.328	6.985.405.808	53.755.520	0,76
Belanja Lembur	98.284.000	77.104.000	21.180.000	0,00
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	8.337.414.472	7.299.395.017	1.038.019.455	14,22
Jumlah	15.518.994.800	14.361.904.825	1.112.954.975	7,73

Realisasi Belanja Pegawai (netto) 31 Desember 2018 menurut Laporan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp15.588.991.800,00 sedangkan menurut Laporan Operasional adalah sebesar Rp15.588.991.800,00. Dengan demikian terdapat selisih antara Laporan Realisasi anggaran dengan Laporan Operasional sebesar Rp69.997.000,00 yaitu nilai Beban Uang Makan Tahun 2017 yang dibebankan di Tahun 2018.

Tabel Perbandingan Realisasi Beban Pegawai Tahun 2017
Menurut LO dan LRA:

Uraian	Realisasi		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Belanja Gaji Tunjangan PNS	7.083.296.328	7.153.293.328	(69.997.000)
Belanja Lembur	98.284.000	98.284.000	-
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	8.337.414.472	8.337.414.472	-
Jumlah	15.518.994.800	15.588.991.800	(69.997.000)

Selisih realisasi sebesar Rp69.997.000,00 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Pembayaran Uang Makan Tahun 2018 atas beban Tahun 2017	69.997.000
Total	69.997.000

Beban Persediaan
Rp255.523.192,00

D.1.2.2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing Rp255.523.192,00 dan Rp185.224.824,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat pemakaian/konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan disajikan pada Tabel 22 berikut ini:

Tabel 22

Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi		Naik / (Turun)	
	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Jumlah	%
Beban Persediaan Barang Konsumsi	255.523.192	185.224.824	70.298.368	37,95
Jumlah	255.523.192	185.224.824	70.298.368	37,95

Realisasi belanja persediaan (*netto*) tahun 2018 menurut LRA sebesar Rp433.824.061,00, sedangkan menurut LO sebesar Rp255.523.192,00. Perbedaan tersebut disebabkan Belanja Persediaan dicatat sebagai perolehan persediaan di Neraca, sedangkan Beban Persediaan merupakan pemakaian persediaan selama Tahun 2018.

Beban Barang dan Jasa
Rp1.717.230.162,00

D.1.2.3. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing Rp1.717.230.162,00 dan Rp1.369.756.128,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa disajikan pada Tabel 23 berikut ini:

Tabel 23

Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi		Naik / (Turun)	
	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Jumlah	%
Beban Barang Operasional	1.266.126.038	1.030.344.827	235.781.211	22,88

Beban Barang Non Operasional	127.339.250	29.050.000	98.289.250	338,35
Beban Langganan Daya dan Jasa	328.749.183	310.361.301	13.403.573	4,32
Jumlah	1.717.230.162	1.369.756.128	347.474.034	25,37

Tabel Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2018 menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Barang Operasional	1.266.126.038	1.266.126.038	-
Beban Barang Non Operasional	127.339.250	127.339.250	-
Beban Jasa	323.764.874	328.749.183	(4.984.309)
Total	1.717.230.162	1.722.214.471	(4.984.309)

Selisih realisasi Beban Jasa sebesar Rp4.984.309,00 adalah selisih Beban Listrik tahun 2017 yang dibebankan di tahun 2018 sebesar Rp25.087.096,00 dan Beban Listrik Yang Masih Harus Dibayar tahun 2018 sebesar Rp20.102.787,00.

Beban
Pemeliharaan
Rp713.859.793,00

D.1.2.4. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing Rp713.859.793,00 dan Rp607.458.383,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap dan aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan disajikan pada Tabel 24 berikut ini:

Tabel 24

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi		Naik / (Turun)	
	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Jumlah	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	344.360.947	279.543.065	64.817.882	23,19
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	360.094.770	308.574.968	51.519.802	16,70
Beban Persediaan untuk Pemeliharaan	9.404.076	19.340.350	(9.936.274)	(51,38)
Jumlah	713.859.793	607.458.383	106.401.410	17,52

Realisasi belanja pemeliharaan (*netto*) Tahun 2018 menurut LRA sebesar Rp713.859.793,00. sedangkan menurut LO sebesar Rp714.441.778,00. Perbedaan tersebut disebabkan Belanja Persediaan Untuk Pemeliharaan dicatat sebagai perolehan persediaan di Neraca. sedangkan Beban Persediaan Pemeliharaan merupakan pemakaian persediaan selama Tahun 2018.

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp1.073.492.835,00

D.1.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing Rp1.073.492.835,00 dan Rp879.600.426,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi disajikan pada Tabel 25 berikut ini:

Tabel 25
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi		Naik / (Turun)	
	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Jumlah	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	331.455.807	312.496.288	18.959.519	6,07
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	722.529.979	560.096.945	162.433.034	29,00
Beban Penyusutan Irigasi dan Jaringan	11.876.174	7.007.193	4.868.981	69,49
Beban Penyusutan Aset Tak Berwujud	7.630.875	-	7.630.875	-
Jumlah	1.073.492.835	879.600.426	193.892.409	22,04

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional
Rp12.889.185,00

D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp12.889.185,00

dan Rp8.737.637,00. Jumlah tersebut merupakan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Rp12.889.185,00

D.2.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp12.889.185,00 dan Rp8.737.637,00.

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Rp17.945.680,00

D.2.1.1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp17.945.680,00 dan Rp11.509.452,00.

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Rp5.056.495,00

D.2.1.2. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp5.056.495,00 dan Rp2.771.815,00 dan rincian dari Pendapatan dan Beban dari Kegiatan Non Operasional dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Uraian	Realisasi		Naik / (Turun)	
	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Jumlah	%
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.056.495	2.771.815	2.284.680	82,43
Jumlah	5.056.495	2.771.815	2.284.680	82,43

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp60.684.617.212,00

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp60.684.617.212,00 dan Rp32.149.522.439,00.

Surplus/(Defisit) LO
(Rp27.371.092.687,00)

E.2. Surplus/(Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar minus Rp27.371.092.687,00 dan Rp20.891.298.400,00. Defisit LO merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan beban operasional atau defisit yang berasal dari kegiatan operasional sebesar minus Rp27.383.981,00 dan surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp12.889.185,00 sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.

Transaksi Antar Entitas
Rp27.140.805.263,00

E.3. Transaksi Antar Entitas

Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp27.140.805.263,00 dan Rp20.621.861.425,00. Jumlah tersebut terdiri atas:

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Ditagihkan ke Entitas Lain	26.824.339.328	20.666.573.211
Diterima dari Entitas Lain	(45.674.304)	(44.711.786)
Transfer Masuk	362.140.239	-
Jumlah	27.140.805.263	20.621.861.425

Ditagihkan ke Entitas Lain
Rp26.824.339.328,00

E.3.1. Ditagihkan ke Entitas Lain

Jumlah Ditagihkan ke Entitas Lain per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp26.824.339.328,00 dan Rp20.666.573.211,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja yang telah diterima pembayarannya dari Kas Negara pada tanggal neraca

Diterima dari Entitas Lain
(Rp45.674.304,00)

E.3.2. Diterima dari Entitas Lain

Jumlah Diterima dari Entitas Lain per 31 Desember 2018 dan 30 Juni 2017 masing-masing sebesar minus Rp45.674.304,00 dan minus Rp44.711.786,00.

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan negara yang

telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal neraca berupa Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Rp36.249.128,00, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Yang Lalu (Pegawai yang berhenti di tahun 2017 namun gaji sudah dibayarkan) Rp8.933.900,00 dan Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Yang Lalu (Denda keterlambatan yang belum dipotong) Rp491.276,00.

*Transfer Masuk
Aset Tetap
Rp362.140.239,00*

E.3.3 Transfer Masuk Aset Tetap

Jumlah Transfer Masuk per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp362.140.239,00 dan Rp0,00.

Jumlah tersebut merupakan transfer masuk dari Pusbin JFA BPKP berupa 1 (satu) unit printer HP Laserjet dan 1 (satu) unit Laptop Lenovo dengan nilai perolehan Rp20.618.000,00 dan akumulasi penyusutan Rp2.577.250,00, Laptop Lenovo, Televisi dan Software dari Pusinfowas sebesar Rp352.427.334,00 dan akumulasi penyusutan Rp8.327.845,00

*Ekuitas Akhir
Rp60.454.329.788,00*

E.4. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp60.454.329.788,00 dan Rp60.454.329.788,00. Nilai tersebut merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset sebesar Rp60.474.432.575,00 dikurangi nilai Kewajiban sebesar Rp20.102.787,00.

F. INFORMASI PENTING LAINNYA**F.1. Informasi Dana Penugasan Bantuan Kedinasan**

Selama Tahun 2018 kegiatan pengawasan selain didanai dari DIPA juga didanai dari bantuan kedinasan. Kegiatan tersebut berupa pendampingan, bimbingan teknis dan sosialisasi berdasarkan permintaan dari kementerian/lembaga, dan BUMN/BUMD/ BLU yang menjadi mitra kerja Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 jumlah penugasan yang dibiayai dari dana bantuan kedinasan sebanyak 79 PP dan telah terbit 66 LHP, dan realisasi dana bantuan kedinasan sebesar Rp363.132.233,00 dengan rincian sebagai berikut:

Unit	JUMLAH		
	PP	LHP	RP
Instansi Pemerintah Pusat	7	5	14.060.000
APD	68	57	210.975.516
Akuntan Negara	4	4	138.096.717
Jumlah	79	66	363.132.233

Dari jumlah tersebut, dana mitra kerja setelah dikurangi KAP Rendal menjadi sebesar Rp225.035.516,00. Jumlah dana tersebut seluruhnya dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh pihak mitra kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra kerja. Pegawai BPKP yang diberi tugas oleh pimpinan unit masing-masing diterbitkan Surat Perintah Dinas (SPD) Nihil dengan beban anggaran mitra kerja dan pada akhir kegiatan/penugasan pegawai dimaksud menerima dan menandatangani kuitansi penggantian biaya perjalanan dinas/transport lokal dan selanjutnya dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra kerja.